

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR . 971.11 / 650 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT SELAKU PENANGGUNG
JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa Camat memiliki peran strategis dalam rangka Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat kecamatan, sehingga perlu memberikan penghargaan kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Penghargaan Kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat kecamatan Yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo ,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043),
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Penghargaan Kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA . Pemberian penghargaan kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat kecamatan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.
- KETIGA . Pemberian penghargaan kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat kecamatan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan pada kriteria, sebagai berikut :
- Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa/kelurahan yang penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 mencapai target minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan yang ada; dan
 - Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa yang lunas PBB-P2 Tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- KEEMPAT . Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat kecamatan yang berkinerja baik, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura : Jumlah desa / kelurahan yang mencapai prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 sebesar $75\% \times \text{bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah} \times \% \text{realisasi PBB-P2 kecamatan} \times \text{indeks penghargaan}$.
 - Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a . Jumlah desa/kelurahan yang lunas PBB-P2 Tahun 2020 $\times \text{bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah} \times \% \text{realisasi PBB-P2 kecamatan} \times \text{indeks penghargaan}$
- KELIMA : Prosentase realisasi PBB-P2 kecamatan, ditentukan berdasarkan capaian realisasi PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- KENAM . Indeks penghargaan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah keseluruhan nominal penghargaan yang diterima seluruh desa/kelurahan dibanding dengan jumlah desa/kelurahan penerima penghargaan.
- K TUJUH . Bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan besaran prosentase potensi PBB-P2 di kecamatan dibanding potensi PBB-P2 kabupaten, yang ditetapkan sebagai berikut
- Potensi PBB-P2 . $0 - < 7,65\%$ bobotnya sebesar 0,200
 - Potensi PBB-P2 . $\geq 7,65\% - < 15,30\%$ bobotnya sebesar 0,400

7

- c Potensi PBB-P2 : $\geq 15,30\%$ - $< 22,95\%$ bobotnya sebesar 0,600
- d Potensi PBB-P2 : $\geq 22,95\%$ - $< 30,60\%$ bobotnya sebesar 0,800
- e Potensi PBB-P2 : $\geq 30,60\%$ - $< 38,25\%$ bobotnya sebesar 1,000

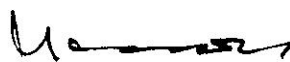
KEDELAPAN Hadiah uang tunai untuk Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan tingkat kecamatan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.

KESEMBILAN Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

KESEPULUH Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 NOVEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

- 1 Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 6 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 7 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 8 Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

7

DAFTAR PERHIMPAN PENGHARGAAN UNTUK KAMAL SELAKU PENANGGUNG JAWAB
 PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK DI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	PENAGUNG JAWAB PLNAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	WERU	CAMAT WERU	Rp. 6.418.803	12 DESA KATEGORI LUNAS
2	BULU	CAMAT BULU	Rp. 6.693.981	12 DESA KATEGORI LUNAS
3	TAWANGSARI	CAMAT TAWANGSARI	Rp. 6.627.995	12 DESA KATEGORI LUNAS
4	SUKOHARJO	CAMAT SUKOHARJO	Rp. 7.219.819	8 DESA KATEGORI LUNAS
5	NGUTER	CAMAT NGUTER	Rp. 1.313.803	3 DESA KATEGORI LUNAS
6	BENDOSARI	CAMAT BENDOSARI	Rp. 5.496.638	11 DESA KATEGORI LUNAS
7	POLOKARTO	CAMAT POLOKARTO	Rp. 6.804.238	13 DESA KATEGORI LUNAS
8	MOJOLABAN	CAMAT MOJOLABAN	Rp. 2.255.944	5 DESA KATEGORI LUNAS
9	GROGOL	CAMAT GROGOL	Rp. 5.357.137	3 DESA KATEGORI LUNAS
10	GATAK	CAMAT GATAK	Rp. 1.743.328	5 DESA KATEGORI LUNAS
11	KARTASURA	CAMAT KARTASURA	Rp. 876.879	1 DESA KATEGORI LUNAS

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA